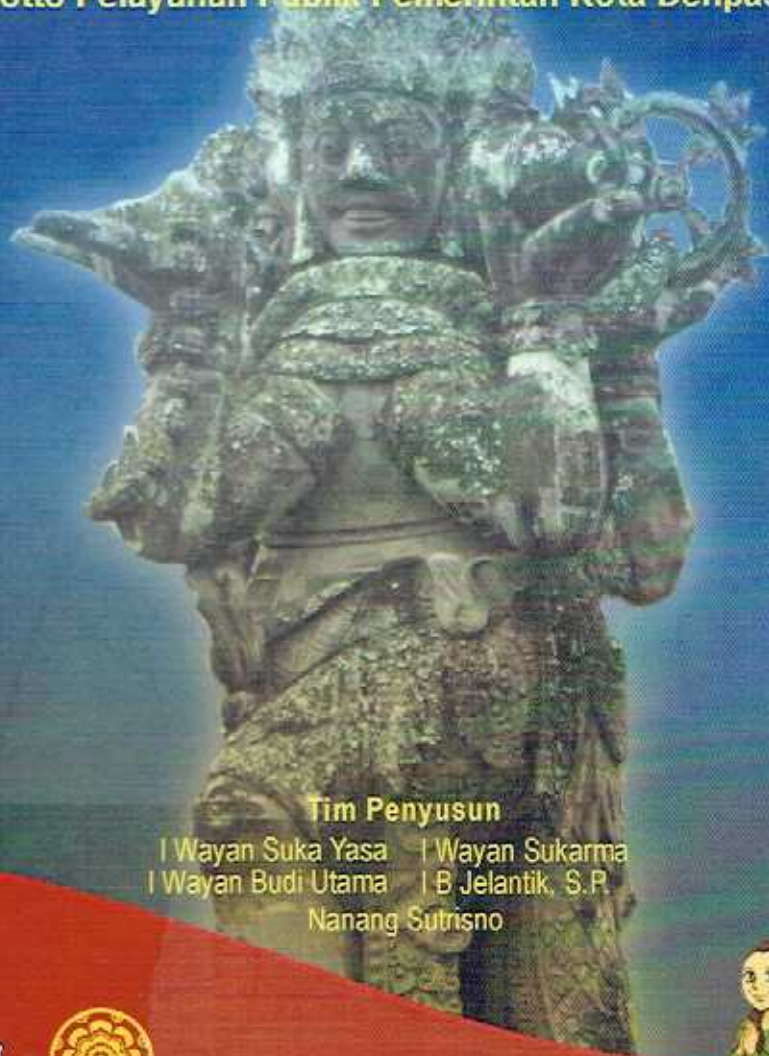


# Sewaka Dharma

Motto Pelayanan Publik Pemerintah Kota Denpasar



## Tim Penyusun

I Wayan Suka Yasa | I Wayan Sukarma  
I Wayan Budi Utama | B. Jelantik, S.P.  
Nanang Sutrisno

KAAN  
Utama



Kerjasama Dinas Perijinan Kota Denpasar  
dengan Program Pascasarjana UNHI Denpasar 2011





**Sewaka Dharma**

**Oleh :**

I Wayan Suka Yasa  
I Wayan Budi Utama  
I Wayan Sukarma  
Ida Bagus Jelantik, SP.  
Nanang Sutrisno

---

Cover Design : M. Setia

---

Lay Out : N. Bakti

---

Cetakan 1  
Desember 2011  
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

---

Penerbit ESBE buku  
Jl. Padma 30 Penatih, Denpasar Timur, Denpasar.  
esbenasi@yahoo.com

---

ISBN : 978-602-9138-14-6

---

Isi di luar tanggung jawab percetakan  
CV. Setia Bakti Primatama

---

*ii Sewaka Dharma*

---



# SAMBUTAN WALIKOTA DENPASAR

*Om Swastyastu,*

*Puji astungkara dan angayubagya saya persembahkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Kuasa, atas wara-nugraha Beliau sehingga kita dapat menikmati buku ini. Tentu saja, kehadiran buku ini saya sambut dengan gembira karena Pemerintah Kota Denpasar memang membutuhkan lebih banyak referensi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Terlebih lagi bahwa Pemerintah Kota Denpasar telah mencanangkan Sewaka Dharma menjadi spirit dalam pelayanan publiknya. Sewaka Dharma adalah konsep yang sangat abstrak dan memiliki makna yang luas dan dalam.*

Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan kalau masih banyak aparatur pemerintah yang tidak

memahami esensi dibalik konsep tersebut. Sementara itu, literatur yang dapat dijadikan bahan bacaan untuk memahami dan mengapresiasi konsep ini juga masih sangat minim sehingga kehadiran buku ini memiliki arti penting tersendiri. Setidak-tidaknya, buku ini dapat dijadikan media pencerahan, terutama bagi para abdi negara di jajaran Pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Saya tertarik dan sepakat dengan isi buku ini yang menyatakan bahwa pelayanan prima akan terwujud apabila terdapat setiap aparatur pemerintah memiliki prinsip hidup, kompetensi, dan sikap dalam pelayanan, yang tertanam dalam dirinya. Artinya, pelayanan bukan hanya bersifat keluar, melainkan lahir dari pribadi yang loyal, profesional, dan memiliki integritas kepribadian.

Akhirnya, saya ucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penyusun yang telah berhasil menyelesaikan buku ini. Dengan harapan agar kiranya buku ini dapat dibaca oleh seluruh aparatur di jajaran Pemerintah Kota Denpasar khususnya, sehingga mereka memiliki wawasan yang luas terhadap tugas, kewajiban, dan fungsinya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan spirit *Sewaka Dharma*.  
*Om Santih Santih Santih Om.*

Denpasar, Desember 2011

Walikota Denpasar

Rai Dharmawijaya Mantra

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengantar Penulis.....	iii
Sambutan Walikota Denpasar .....	vii
Daftar Isi.....	ix
Bab I Pendahuluan.....	1
Bab II Pengertian <i>Sewaka Dharma</i> .....	27
Bab III Kewajiban Pemerintah .....	37
3.1 Menurut <i>Arthashastra</i> .....	37
3.2 Menurut I Gusti Ngurah Made Agung.....	56
Bab IV Pelayanan <i>Asta Brata</i> .....	73
4.1 Hakikat Pelayanan.....	74
4.2 Pelayanan <i>Asta Brata</i> .....	78
Bab V Menjadi <i>Sang Sewaka Dharma</i> .....	103
5.1 Prinsip Hidup <i>Sang             Sewaka Dharma</i> .....	104
5.2 Kompetensi <i>Sang Sewaka Dharma</i> ....	125
5.3 Perilaku <i>Sang Sewaka Dharma</i> .....	133

---

Bab VI Pengendalian Diri dalam	
<i>Sewaka Dharma</i> .....	145
6.1 Pentingnya Pengendalian Diri.....	145
6.2 Pengendalian Diri dalam	
Sistem Birokrasi.....	159
6.3 Pengendalian Diri dalam	
Pelayanan Publik.....	176
BabVII Penutup.....	197
Daftar Pustaka.....	205

---

# BAB I

## PENDAHULUAN

*"Perubahan itu abadi". Begitu pandangan Zeno tentang realitas, baik yang dikonstruksi lewat rasio maupun dialami secara empiris. Berdasarkan pandangan ini kemudian, Heraklitos mengungkapkan bahwa segala sesuatu senantiasa dalam kementerian. Dengan ungkapan ini, Heraklitos hendak menunjukkan sifat relatif dari kondisi material yang tidak kekal. Perubahan inilah yang menjadi terma kehidupan pada setiap bangsa sepanjang masa, seperti reformasi yang bergulir Mei 1998 menandai perubahan paradigma dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat di Indonesia.*

---

masyarakat atau negara (KBBI, 2005:939). Pengertian ini menegaskan bahwa reformasi menghendaki perubahan paradigmatik dalam pengelolaan bidang-bidang kehidupan terutama bidang kehidupan yang berkaitan dengan tatanan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Perubahan paradigmatik ini mengandaikan hasrat dan kehendak penyempurnaan dunia-kehidupan melalui efektivitas dan efisiensi pandangan-dunia untuk memelihara-keberlangsungan kehidupan itu sendiri. Peningkatan derajat dan harkat manusia memang harus berada dalam ide dan gagasan para pengelola pemerintahan, baik lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif.

Pemerintahan sebagai seni pengelolaan kekuasaan memang telah hadir bersamaan dengan adanya manusia, bahkan sejak awal kehidupannya. Ini didasari pada asumsi bahwa dalam kehidupan sehari-hari setiap orang mempunyai kebutuhan dan keinginan, bahkan kepentingan yang berbeda dan berlawanan antara yang-satu dan yang-lainnya. Ini berarti perbedaan bahasa, agama, dan tradisi sosial pada dasarnya memberikan tugas kepada manusia untuk menciptakan tatanan dunia kehidupan dan menemukan jalan hidup. Dengan jalan hidup ini individu ataupun kelompok-kelompok yang

---

berbeda dan berlawanan dapat hidup berdampingan, damai, dan mengambil langkah-langkah konstruktif untuk mencapai martabat dan kehidupan mulia bagi semua.

Ini menunjukkan bahwa perbedaan, selain dapat menciptakan konsensus dan harmoni, juga lebih besar berpotensi menciptakan konflik dan disharmoni. Tentu yang lebih besar ini menjadi pekerjaan rumah yang mesti dihadapi dan harus diselesaikan oleh organisasi dan/atau model kerja sama yang sejenisnya. Akan tetapi, pada kenyataan empiris sehari-hari tidak jarang ditemukan penyakit sosial yang bersumber dari kesenjangan antara lembaga-lembaga sosial dan tujuan-dunia. Kesenjangan yang melahirkan krisis dalam dunia-kehidupan manusia, baik pada aspek sosial, budaya maupun agama (Radhakrishnan, 2003:15). Untuk membangun konsensus dan mengatasi krisis inilah tujuan utama dibentuknya pemerintahan, yaitu untuk menjaga suatu tatanan kehidupan bersama dalam suatu sistem ketertiban dan keteraturan sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara wajar (Rasyid, 1997:11). Ini menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah melayani dan mengatur masyarakat. Menurut Thoha (1995:102), tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan



---

kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik, dan memberikan kepuasan kepada publik. Sementara itu, tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan (*power*) yang melekat pada posisi jabatan birokrasi tertentu. Dengan demikian, suatu pemerintahan dikatakan baik dan berhasil, bila pemerintahan itu sanggup melindungi, mampu memberdayakan, dan bisa menyejahterakan rakyatnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan seni untuk menentukan sasaran utama dari reformasi birokrasi, antara lain memperbaiki struktur, kultur, dan aparatur pemerintahan dalam kerangka kerja sistemik. Struktur bertalian erat dengan sistem pemerintahan sehingga keberadaannya menjadi kunci keberhasilan bagi suatu pemerintahan. Reformasi menghendaki adanya struktur pemerintah yang efektif dan efisien – berdaya guna dan berhasil guna. Efektivitas dan efisiensi struktur ini akan mendapatkan makna yang sebenar-benarnya, bila struktur pemerintah mampu membangun kultur pemerintahan yang kondusif. Agenda reformasi menekankan pada kultur pemerintahan yang transparan, akuntabilitas, dan profesional. Selanjutnya, struktur dan kultur ini hanya akan berjalan dengan baik, bila didukung

---

oleh aparatur pemerintah yang mumpuni, profesional, serta memiliki dedikasi dan loyalitas. Secara bersama-sama, baik struktur, kultur, maupun aparatur pemerintah harus diarahkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang paling hakiki dari pemerintah, yakni pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan membuahkan keadilan masyarakat, pemberdayaan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Keadilan, kemandirian, dan kesejahteraan merupakan jargon-jargon pemerintahan era reformasi. Dengan jargon-jargon ini, pemerintah tidak dapat berbuat lain, selain menempatkan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pengelolaan pemerintahan. Partisipasi masyarakat seperti ini seturut dengan cita-cita reformasi dan paradigma pemerintahan masa kini dibangun dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Sejak reformasi dikumadangkan, bahkan tuntutan kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik semakin kuat. Tuntutan ini seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang lebih banyak dipicu oleh perubahan dalam bidang politik,

---

sosial, ekonomi, dan agama. Perubahan pada bidang-bidang ini secara signifikan telah membawa konsekuensi besar terhadap bidang kehidupan lainnya. Asumsinya, semakin tingginya tingkat persaingan hidup, mobilitas sosial, dan kebutuhan terhadap kenyamanan akan menjadi faktor penting yang mendorong semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Artinya, dinamika masyarakat yang semakin modern meminta respons pemerintah secara positif melalui peningkatan pelayanan publik yang inheren dengan tujuan reformasi birokrasi itu sendiri. Dengan demikian, pemerintah bukan semata-mata hanya menjadi agen yang mengantarkan masyarakat pada kondisi kemajuan dan kemapanan, tetapi juga menjadi agen bagi terciptanya keadilan bagi seluruh warga negara.

Untuk itu perlu disadari bahwa pembangunan telah menimbulkan konstruksi budaya modernitas yang ditandai dengan semakin luasnya penerimaan prinsip rasio, subjek, identitas, ego, totalitas, ide-ide absolut, kemajuan linear, objektivitas, otonomi, emansipasi, dan oposisi biner (Haryono, 2005:35). Artinya, modernisasi sebagai proses deferensiasi budaya dan otonomi sosial, karena itu modernisme dipahami sebagai dampak dari proses diferensiasi. Apabila modernisasi adalah proses

---

deferensiasi dan otonomi budaya, maka modernitas adalah suatu perubahan sosial dan budaya yang bersifat massif dan berkaitan dengan masyarakat kapitalis industri. Dengan demikian, modernisasi telah sukses dan berhasil menciptakan pluralisasi nilai, norma, makna, dan simbol yang menjurus kepada segmentasi budaya dan kemajemukan pandangan hidup.

Kemajemukan pandangan hidup itu, juga tidak lepas dari proses komprehensif pertumbuhan ekonomi, mobilisasi sosial, dan ekspansi budaya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan secara progresif tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk pada umumnya. Mobilisasi sosial adalah proses keterlibatan yang lebih besar dalam kelompok-kelompok sekunder, pola-pola baru, sosialisme antisipatoris, dan pembentukan kelompok referensi baru yang terpisah dari yang tradisional. Selanjutnya, ekspansi budaya adalah proses penyempitan bidang aksi yang bersifat preskriptif, perluasan rentangan alternatif alternatif dan memulai pola-pola sosialisasi dan tingkah laku baru. Ketiga proses ini menghasilkan modernitas yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi, mobilisasi sosial, dan perluasan budaya (Abraham, 1991:206).



---

Pertumbuhan ekonomi meliputi ciri-ciri peningkatan konsumsi energi material; tingkat teknologi yang tinggi; dominannya sektor sekunder dan tersier melebihi sektor primer; diversifikasi produksi yang ada dalam kerangka perkembangan yang terintegrasi; pemisahan kerja dengan rumah tangga dan peningkatan diferensiasi struktur ekonomi; dan tumbuhnya spesialisasi peranan ekonomi dan unit-unit kegiatan ekonomi produksi, konsumsi dan pemasaran. Mobilitas sosial mencakup, antara lain peningkatan partisipasi melalui perkumpulan perkumpulan sukarela para komunitas dan kelompok-kelompok sekunder lainnya; kesadaran sosial yang besar yang dipermudah oleh kemajuan dalam transportasi dan komunikasi; revolusi pengetahuan dan perluasan gagasan-gagasan; manipulasi psikologis melalui penghalusan keterampilan keterampilan ideasional yang didukung oleh teknologi yang canggih khususnya media massa; mobilitas sosial yang meningkat yang mengarah pada pencairan struktur kelas secara lebih besar; dan mobilitas fisik yang meningkat mendorong ke arah urbanisasi yang lebih besar. Kemudian, aspek terpenting ekspansi budaya, antara lain peningkatan angka melek huruf; ekspos media massa secara lebih besar; perluasan kawasan rekreasi,

---

hiburan, dan nilai-nilai budaya di luar bidang keluarga, kekerabatan, dan kelompok-kelompok lokalitas; penilaian kembali lembaga-lembaga pribumi juga nilai-nilai dan tujuan-tujuan tradisional termasuk menyajikan alternatif yang dapat menggantikan sistem-sistem yang asing; dan pembentukan struktur lembaga baru, prosedur, dan orientasi nilai yang mampu menghadapi tantangan perubahan yang cepat (Abraham, 1991:207—209).

Dalam kerangka modernitas yang ditandai oleh perluasan ekonomi, mobilitas sosial, dan ekspansi budaya, ternyata manusia modern membangun identitasnya melalui partisipasi sosial. Oleh karena itu, manusia modern ditandai dengan munculnya masyarakat berorganisasi (*organizational society*) dan masyarakat birokrasi (*bureaucratic society*). Kemunculan masyarakat berorganisasi dan birokrasi ini pada dasarnya seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dasarnya, hak-hak demokratisnya, dan kebebasan individu. Peran pemerintah sebagai agen perubahan (*the agent of change*) sesungguhnya telah turut serta membangun terbentuknya masyarakat seperti ini sehingga mau tidak mau, modernisasi selalu berhubungan dengan kinerja pemerintah itu sendiri. Dengan mengacu pemikiran Sutopo dan Suryanto (2006:3), hubungan antara masyarakat

---

modern dan pemerintah secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut.

- (a) Manusia modern yang semakin cerdas menuntut lebih banyak dari pemerintahnya. Oleh karena itu, juga pemerintah harus berbuat lebih banyak bagi warganya.
- (b) Tingkat pendidikan yang semakin tinggi mengakibatkan masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, semakin pintar pula dalam menuntut hak-haknya, meskipun terkadang tidak diimbangi dengan meningkatnya kesadaran terhadap kewajibannya kepada negara, bangsa, dan pemerintah.
- (c) Kebudayaan yang dicapai semakin lama semakin tinggi. Dalam arti bahwa kesadaran masyarakat terhadap norma-norma kemanusiaan, nilai-nilai sosial, harkat, dan martabatnya juga semakin tinggi. Ini memberikan tuntutan agar kepribadian dan hak-hak hidupnya dihargai, bukan saja oleh orang lain, tetapi juga oleh pemerintah.

Perkembangan di atas sekaligus menunjukkan terjadinya pergeseran konsepsi negara pada abad XX ini.

---

Ide negara kepolisian (*police state*) telah bergeser menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*). Perubahan konsepsi ini menempatkan pemerintah tidak lagi hanya sebagai pengatur negara, tetapi secara aktif dan kreatif berusaha mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan warganya dalam berbagai aspek kehidupan. Konsekuensinya bahwa negara mengemban empat tugas dan fungsi pokok, yaitu *protectional function* (fungsi perlindungan), *welfare function* (fungsi kesejahteraan), *educational function* (fungsi pendidikan), dan *peacefulness function* (fungsi kedamaian) (Varma, 2001). Keempat fungsi ini bukan fungsi terpisah antara yang-satu dan yang-lainnya, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh karena tidaklah mungkin menjalankan fungsi kesejahteraan tanpa fungsi-fungsi lainnya.

Penjelasan teoretis tentang kemutlakan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan negara kesejahteraan tersebut, juga dapat dilihat dari teori Adam Smith tentang tugas pokok pemerintah. Menurut Smith (Rahayu, 1997:2-5) bahwa tugas pokok pemerintah meliputi, antara lain (a) melindungi masyarakat dari ancaman dan kejahatan (*military force*), (b) melindungi masyarakat dari ketidakadilan (*injustice*) dan penindasan (*oppression*); dan (c) pembangunan serta pemeliharaan

---

lembaga termasuk aktivitas pemerintah. Sederhananya, peran dan fungsi pemerintahan modern adalah melakukan perbaikan keluar, yaitu mengupayakan terciptanya kesejahteraan masyarakat dan perbaikan ke dalam melalui peningkatan kualitas struktur, kultur, dan aparatur birokrasi pemerintahan. Dengan demikian, kewajiban utama dari pemerintah adalah mewujudkan konsep ideal tentang negara kesejahteraan.

Pada dasarnya Indonesia telah mencita-citakan terwujudnya negara kesejahteraan (*welfare state*). Cita-cita ini telah diungkap dalam konstitusi dan garis-garis besar pembangunan Indonesia yang sudah diarahkan pada tercapainya cita-cita tersebut. *Pertama*, sila kelima dari Pancasila adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Bangsa Indonesia. Ini berarti bahwa tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. *Kedua*, dalam Pembukaan UUD 1945 (alinea IV) dikatakan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. *Ketiga*, dalam Pasal 33 ayat (1),

---

(2) dan (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mengenai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. *Keempat*, dalam GBHN sebagai acuan dalam pembangunan negara ditegaskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Aruan, 2004).

Konsep tentang negara kesejahteraan (*welfare state*), baik sebagai paradigma baru maupun cita-cita luhur dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia tampaknya sejalan dengan pandangan politik Hindu. Pandangan Hindu tentang politik terutama tertuang dalam kitab *Arthashastra*, juga dalam teks-teks lainnya, seperti *Canakya Nitisastra*, *Ramayana*, *Mahabharata* (bagian *Santi Parwa*), *Kakawin Nitisastra*, dan *Rajaniti*. Misalnya, dalam *Santi Parwa* LXIII, menguraikan peran politik bagi kehidupan manusia sebagai berikut.

---

“Manakala agama telah sirna, Weda pun sirna pula, semua aturan hidup hilang musnah, semua kewajiban manusia terabaikan. Pada politiklah semua berlindung. Pada politiklah semua awal tindakan diwujudkan, pada politiklah semua pengetahuan dipersatukan, pada politiklah semua dunia terpusatkan”.

“Ketika tujuan hidup manusia - *dharma*, *artha*, *kama*, dan *moksa* semakin jauh. Begitu juga pembagian masyarakat semakin kacau, maka pada politiklah semua berlindung, pada politiklah semua kegiatan agama/*yajna* diikatkan, pada politiklah semua pengetahuan dipersatukan, dan pada politiklah dunia terpusatkan”.

*Santi Parwa* hendak mengingatkan pemerintah yang pada prinsipnya sebagai penentu dan pelaksana kebijakan politik seharusnya menggunakan kekuatan politiknya untuk mengarahkan manusia pada pencapaian tujuan hidupnya, yaitu *dharma*, *artha*, *kama*, dan *moksa*. Dalam konteks ini, negara ataupun pemerintah berperan penting dalam mengusahakan dan memelihara

---

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu pemerintah mesti dijalankan dalam struktur, kultur, dan aparatur yang memiliki pikiran jernih, ungkapan jujur, dan perbuatan baik. Seturut dengan hal ini, *Arthashastra* mengajarkan usaha-usaha untuk mendapatkan keseimbangan antara kemakmuran rakyat dan kekayaan negara.

*Arthashastra* mengajukan dua syarat utama, yaitu penegakan hukum dan ketertiban serta kinerja administratif yang memadai (Radendra, 2005:3-4). Artinya, tugas pemerintah dalam menciptakan rasa aman, nyaman, dan keadilan kepada masyarakat sejalan dengan makna kesejahteraan itu sendiri. Oleh karena itu, sudah seharusnya hal ini dijadikan tujuan dan sasaran pemerintah dalam memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Senada dengan hal ini, juga *Kakawin Ramayana* (Bab III, sloka 84) memberi pesan berikut.

*Nahan de sang natha kemita, irikang bhumi subhaga,  
Pararthasih yagong sakalara, nikang rat wi nulatan,  
Tuminghal yatna asing sawuwusikanang sasana  
tinut,  
Tepet masih tar weruh kutima, milaging bancana  
dumeh.*

---

Demikianlah kewajiban seorang raja untuk melindungi dunia demi untuk kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Seorang raja harus selalu mengutamakan kepentingan-kepentingan rakyatnya dan segala penderitaan rakyat juga harus dipikirkan. Semua ajaran dalam kitab-kitab suci harus diikuti sengan seksama. Dengan demikian, rakyat akan tetap mencintai raja dengan teguh, tidak mengenal kecurangan, serta menjauhi penipuan, itulah pahalanya.

Nasihat Rama kepada Bharata tersebut lebih menekankan pada keteladanan pemimpin yang bijaksana yang selalu berpegang teguh pada *dharma*. Pemimpin yang menghindari kesenangan nafsu duniawi dan sebaliknya, selalu memikirkan atau melenyapkan penderitaan rakyat atau orang-orang yang dipimpinnya. Bila dikaitkan antara kepemimpinan dan pelayanan bahwa kedudukan seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya adalah sebagai pelayan. Pelayan dalam hal ini adalah pelayan masyarakat, pelayan negara, dan pelayan dalam arti luas dan dalam, sebagaimana keperluan akan pelayanan dari organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin yang mumpuni memiliki jiwa kenegarawanan dan ini merupakan syarat mutlak

---

terwujudnya kesejahteraan rakyat dan berlaku sebaliknya, pemimpin yang gagal mengemban amanah rakyat akan membawa penderitaan bagi rakyatnya. Konsekuensi logis dari semua ini bahwa seluruh proses politik dan ketatanegaraan sepenuhnya mesti dan harus diarahkan pada terciptanya sosok pemimpin yang mumpuni.

Pemerintah adalah pemimpin yang mesti dan harus melayani rakyat. Hal ini sejalan dengan paradigma reformasi birokrasi bahwa seorang birokrat bukanlah seorang raja yang wajib dilayani dan sebaliknya, birokrat adalah pelayan masyarakat. Dengan pergeseran paradigma ini, pemerintah dituntut senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam wujud pelayanan prima. Dalam Surat Keputusan MENPAN Nomor 81 Tahun 1993 disebutkan bahwa pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah "*Excellent Service*" yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik dan/ atau pelayanan yang terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan.

Untuk mengetahui tingkat pelayanan publik lebih lanjut, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/23/

25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Menterti Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian, dijelaskan bahwa standar pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Tegasnya, aparaturnegara dan penyelenggara negara lainnya adalah pelayan masyarakat.

Menjadi pelayan yang baik memerlukan perpaduan yang sempurna antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Ketiga kecerdasan ini menginternal dalam diri untuk membangun pribadi yang cerdas, santun, dan berwibawa sehingga mampu memberikan pelayanan yang cermat dan akurat, sekaligus menyenangkan. Mengingat dalam pelayanan yang baik, kepuasan konsumen adalah tujuannya yang utama. Terkait dengan hal tersebut, agama merupakan

sumber nilai yang pertama dan utama dalam rangka membangun spirit pelayanan bagi aparaturnegara. Hal ini dapat dipahami karena agama berperan dalam memberikan pengaruhnya terhadap individu, baik dalam bentuk sistem nilai, motivasi maupun pedoman hidup, juga sebagai pembentuk kata hati (Ishomuddin, 2002:36).

Agama memiliki pengaruh sebagai motivasi yang mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas karena perbuatan yang dilatarbelakangi oleh keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian dan ketaatan. Dalam hal ini, agama dapat berperan sebagai motivator dan inspirator bagi tindakan seseorang. Sementara itu, agama sebagai nilai etik membimbing manusia untuk bertindak sesuai dengan norma-norma sehingga dapat memilah dan memilih mana yang boleh dilakukan dan mana yang harus dihindari menurut ajaran agamanya. Dengan kata lain, agama menjadi etos kerja bagi masyarakat pemeluknya. Begitu juga agama memberikan harapan kepada pemeluknya. Orang akan melaksanakan ajaran agamanya dengan baik karena didorong oleh harapan tentang pengampunan atau kasih sayang dari Tuhan. Ajaran-ajaran agama yang berisikan tentang kebahagiaan akhirat di samping kebahagiaan dunia menjadi kekuatan tersendiri bagi manusia dalam menghadapi dinamika kehidupan di dunia-kehidupan



---

yang tidak selamanya sesuai dengan harapan. Ketika pendekatan rasional telah mengalami jalan buntu mengatasi berbagai tantangan dan hambatan, maka agama hadir menawarkan harapan (Notingham, 2003).

Begitu juga agama Hindu, selain mengajarkan cara-cara mengenal kehendak Tuhan untuk manusia dan dunia, juga begitu banyak mengajarkan cara-cara menjalankan kehidupan di dunia relatif ini. Hindu, baik sebagai agama maupun jalan hidup (*way of life*) mengajarkan banyak prinsip tentang pelayanan. Prinsip etos kerja misalnya, Hindu mengajarkan bahwa kerja atau *karma* adalah *yadnya*, *bhakti*, dan pelayanan. Prinsip-prinsip pelayanan inilah dalam agama Hindu yang disebut *Sewaka Dharma*. *Sewaka Dharma* sebagai basis kehidupan mengajarkan pelayanan bukan hanya kepada sesama, tetapi juga kepada Tuhan, leluhur, guru, dan alam. Model pelayanan semacam ini dapat ditelusuri dalam *panca yadnya*. *Panca Yadnya* sebagai ekspresi dari *Panca Sradha* merupakan inti dari sistem nilai kebudayaan Hindu yang mengajarkan pemuliaan kepada Tuhan, leluhur, guru, sesama, dan alam. Dalam hal ini agama Hindu sebagai sistem keyakinan diposisikan sebagai inti kebudayaan karena kebudayaan dimengerti sebagai suatu sistem atau organisasi makna yang dikonsepsikan tersusun berlapis-lapis. Lapisan luar berupa produk-produk eksplisit dari

---

budaya, lapisan tengah berupa norma dan nilai, dan lapisan inti berupa kepercayaan atau anggapan dasar tentang eksistensi manusia itu sendiri.

'Artinya, melalui lima hubungan yang kekal ini manusia membangun dan menata eksistensi dirinya. *Pertama*, dengan *dewa yadnya* membangun dan menata hubungan dengan Tuhan dalam manifestasinya sebagai dewa-dewi. *Kedua*, dengan *pitra yadnya* membangun dan menata hubungan dengan leluhur. *Ketiga*, dengan *rsi yadnya* membangun dan menata hubungan dengan guru. *Keempat*, dengan *bhuta yadnya* membangun dan menata hubungan dengan alam. *Kelima*, dengan *manusa yadnya* membangun dan menata hubungan dengan sesama. Lima pola hubungan inilah yang menjadi dasar pelayanan dalam agama Hindu karena inti dari pelayanan adalah *yadnya*, yaitu *bhakti* itu sendiri. Dengan demikian, *Sewaka Dharma* adalah pelayanan yang berlandaskan *bhakti* kepada segala sesuatu yang berpartisipasi dalam membangun dan menata eksistensi manusia.

Malahan Swami Ramakrishna Paramahansa menegaskan bahwa pelayanan kepada sesama manusia sama nilainya dengan pelayanan kepada Tuhan "*Manawa Sewa Madhawa Sewa*" (Rajeev, 1990:28-29). Pandangan ini menegaskan pelayanan adalah hakikat kemanusiaan yang dicerahi oleh nilai-nilai ketuhanan. Pelayanan adalah

---

upaya manusia mewujudkan keilahian di dirinya dalam dunia-kehidupan yang selalu berubah. Dengan demikian, pelayanan menjadi kewajiban moral untuk menegaskan kehadiran individu atau kelompok dalam dunia-manusia yang sarat dengan kontradiksi nilai dan norma. Artinya, dalam konsep *Sewaka Dharma* sudah berisi nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan, karena itu layak menjadi dasar komitmen sekaligus tujuan tindakan termasuk menjadi cara dan alat bertindak. Dengan demikian, *Sewaka Dharma* merupakan prinsip pengarah (*guiding principle*) bagi manusia untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam kehidupannya.

Pada dasarnya *Sewaka Dharma* merupakan prinsip universal yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Bukan hanya pada bidang kehidupan religius, bahkan dalam konteks birokrasi modern, *Sewaka Dharma* mendapatkan arti dan maknanya yang paling penting dalam upaya mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam hal ini, *Sewaka Dharma* menjadi spirit yang melandasi seluruh bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat demi terwujudnya tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan, yaitu terciptanya masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera lahir dan batin. Artinya, menetapkan *sewaka dharma* menjadi spirit, inti, dan landasan pelayanan

---

publik, sebagaimana ditetapkan Pemerintah Kota Denpasar merupakan ketetapan yang telah merangkum nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan.

Relevansi *Sewaka Dharma* menjadi spirit yang melandasi keseluruhan bentuk pelayanan kepada masyarakat memerlukan landasan konseptual yang jelas. Keperluan ini merupakan alasan kuat untuk menempatkan Pengertian *Sewaka Dharma* dalam bentuk idealnya, "*manawa sewa madharwa sewa*" menjadi bahasan *kedua* setelah pendahuluan merupakan bagian *pertama*. Landasan konseptual ini diharapkan dapat memperkuat komitmen dan kewajiban pemerintah kepada masyarakat terutama dalam melayani dan mengatur masyarakat. Tugas melayani dan mengatur ini dibahas pada bagian *ketiga*, yaitu tugas pelayanan dengan mengutamakan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses urusan publik, dan memberikan kepuasan kepada publik. Kemudian, tugas mengatur lebih menekankan pada kekuasaan yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Untuk itu kiranya diperlukan dukungan dari spirit kepemimpinan *Astabrata*. Konsep pelayanan *Astabrata* ini menjadi bahasan *keempat*, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri. Mengingat hubungan antara pemimpin dan masyarakat

---

adalah hubungan antara pemimpin dan pelayan. Pemimpin adalah pelayan negara, bangsa, dan masyarakat. Oleh karena itu, konsep kepemimpinan *Astabrata* dipandang layak diketengahkan dalam pembahasan *Sewaka Dharma*, pelayanan Hindu. Kepemimpinan *Astabrata*, antara lain menuntut karakteristik pelayan yang memiliki delapan sifat *dewata*, yaitu Indra, Yama, Surya, Candra, Bayu, Kuwera, Baruna, dan Agni. Dewa-dewa inilah yang menjadi anggota badan sang pelayan, karena itu sekaligus menjadi karakteristiknya. Karakteristik pelayan inilah yang mampu menjadikan dirinya sebagai tenaga pendorong melindungi kehidupan rakyat, selalu ingat menjunjung tinggi sumpah janji seorang ksatria, dan selalu menjadikan ajaran suci sebagai pegangan dalam berpikir, berucap, dan berbuat.

Menyempurnakan pandangan *Astabrata* di atas, juga diketengahkan pandangan *Dharma Sasana* dan *Niti Raja Sasana* karya I Gusti Ngurah Made Agung (Tjokorda Mantuk Ring Rana). *Dharma Sasana* menguraikan 16 *brata* bagi seorang pemimpin dan *Niti Raja Sasana* menguraikan 3 Perilaku pemimpin, yaitu *Wijayasastra*, *Sopadina*, dan *Nagarajnana*.

Dengan begitu, pemerintah sungguh-sungguh menjadi *Sang Sewaka Dharma*, pengabdian *dharma* sejati.

---

Menjadi *Sang Sewaka Dharma* inilah bahasan *kelima*, yaitu perpaduan sempurna antara prinsip hidup, kompetensi, dan perilaku pelayanan. Dapat dipercaya bahwa sebagian potensi pelayanan ini merupakan faktor bawaan, hereditas, daya potensial (*karma wasana*). Akan tetapi, sebagian besar lainnya dibangun oleh lingkungan, baik alam, sosial, maupun budaya melalui proses pembelajaran (*sewaka guna widya*). Malahan Hindu mengajarkan proses pembelajaran seumur hidup yang berlangsung sepanjang hayat dikandung badan untuk mengantarkan manusia kepada kedewasaan dan kematangan. Hanya manusia dewasa dan matanglah yang bisa menjadikan dirinya *Sang Sewaka Dharma*.

Ciri terpenting dari *Sang Sewaka Dharma* adalah kemampuannya mengendalikan diri. Pengendalian diri inilah dibahas pada bagian *keenam*, yaitu pentingnya pengendalian diri dalam benteng etika karena secara eksistensial manusia adalah makhluk bebas. Manusia bukan hanya makhluk berkehendak bebas, bahkan kebebasan itu sendiri adalah manusia. Untuk membangun eksistensinya, baik individu maupun sosial, manusia senantiasa merujuk pada kebebasan itu sendiri. Hakikat manusia adalah kebebasan sehingga secara moral memiliki kewajiban kebebasan moral. Dalam hal ini, manusia mesti dan harus tunduk pada aturan moral dan

- Apakah kesedihan itu?  
*Pergaulan dengan orang jahat*
- Apakah kerugian itu ?  
*Tidak memanfaatkan waktu dgn baik*
- Apakah kepandaian itu ?  
*Selalu berpedoman kepada agama*
- Siapakah yang disebut pemberani ?  
*Yang menang dari sebelas indrianya*
- Siapakah kekasih yang sebenarnya ?  
*Ia yang setia*
- Apakah kekayaan itu ?  
*Pengetahuan yang benar*
- Apakah kebahagiaan itu ?  
*Tidak tinggal di negeri orang*

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adia Wiratmadja, G.K. 1995. *Kepemimpinan Hindu*. Yayasan Dharma Naradha.
- Aruan. Reytman. 2004. *Pilar Perjuangan Hak Pekerja*. Artikel dalam *Informasi Hukum Vol. 4 Tahun VI*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Astana, Made & C.S. Anomdiputro (penerjemah). 2005. *Kautilya (Canakya) Arthashastra (Masalah Politik, Ekonomi, Hukum, Budaya dsb.)*. Surabaya: Paramita.
- Astra, I Gede, dkk., 1986. *Kamus Sansekerta-Indonesia*. Denpasar: Pemerintah Daerah Provinsi Tk. I Bali.
- Avalon, Arthur. (penerjemah: K.Nila). 1997. *Mahanirwana Tantra: Arthur Avalon's Tantra of the Great Liberation*. Denpasar: Upada Sastra.
- Bertens, K. 1993. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dimiyati; dan Mudjiono. 2006. *Belajar Dan Pembelajaran*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Fernanda, Desi. 2006. *Etika Organisasi Pemerintah*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Goetsch, David L, dan S.B. Davis. 1994. *Dimensi Kualitas Pelayanan*. Jakarta: Gramedia Pustaka,
- Gunadha, Ida Bagus. 2003. *Pengantar: Studies Of Kautilya*. Denpasar: Program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan, Universitas Hindu Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Modul Kuliah Arthasastra*. Denpasar: Program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan, Universitas Hindu Indonesia.
- Hadiwijono, Harun. 1980. *Sari Sejarah Filsafat Barat I dan II*. Yogyakarta: Kanisius.
- Henry, Nicholy. 1995. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Politik*. (Alih Bahasa : Lontoh, Luciana). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hersey, Paul dan Ken Blanchard. 1995. *Manajemen Perilaku Organisasi, Pemanfaatan Sumber Daya Manusia*. Penerjemah: Agus Dharma Jakarta: Erlangga.
- Indrawijaya, Adam I. 1986. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru.
- Ishomuddin. 2002. *Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kadjeng, I Nyoman. 2005. *Sarasamuccaya*. Surabaya: Paramita.

- Krishna, Ida Bagus Wika. 2003. *Mencegah Stres Dalam Perspektif Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Kusuma, I Nyoman Weda. 2005. *Kakawin Usana Bali Karya Danghyang Nirartha*. Kuta: Pustaka Larasan.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Naskah-Naskah Karya I Gusti Ngurah Made Agung Pemimpin Perang Puputan Badung Tahun 1906 (Transliterasi dan Terjemahan)*. Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar.
- Midgley, James. 2000. *Growth, Redistribution, and Welfare: Toward Social Investment*. London: Analyst.
- Nawawi dan Handari, 1995. *Kepemimpinan dan Organisasi*. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1990. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Nottingham, Elizabeth K. 2003. *Agama Dan masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Pendit, Nyoman S. 2002. *Bhagavadgita*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Priasmono, Soemargono K. dan H.W. Tampubolon, *Konglomerasi Ekonomi Indonesia dalam Rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa : Suatu Tanggungjawab Sosial*, Jakarta : LPSI, 1994.

- 
- Pusat Bahasa P & K. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Radendra S. Ida Bagus. 2005. *Ekonomi dan Politik Dalam Arthasastra*. Denpasar: Program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan UNHI Denpasar bekerjasama dengan Penerbit Widya Dharma.
- Radhakrishnan, S. 1987. *The Present Crisis of Faith*. New Delhi: Orient Paperback.
- Rajeev, Rajendra Kumar. 1990. *World Famous Religions and Sects*. New Delhi.
- Rama, Swami. 2005. *Hidup Dengan Para Rsi di Himalaya*. Surabaya: Paramita.
- Rao, M.V.Krishna. 2003. *Studies In Kautilya*. Denpasar: Program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan UNHI Denpasar bekerjasama dengan Penerbit Widya Dharma.
- Rasyid, Moh. Ryas. 1997. *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan)*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Spicker, Paul. 1995. *Social Policy: Themes and Approaches*. London: Prentice Hall
- Suamba, Ida Bagus Putu (ed). 1996. *Yajna: Basis Kehidupan (Sebuah Canang Sari)*. Denpasar: Warta Hindu Dharma.

- 
- Sudharta, Tjok. Rai dan Gde Pudja MA. 2000. *Manawa Dharmasastra: Kompendium Hukum Hindu*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suharto, Edi (1997), *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: LSP Press
- Suharto, Edi (2005a), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Suharto, Edi (2005b), *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta
- Sukarma, I Wayan. 2005. "Pengendalian Diri dan Menjadi Diri Sendiri". *Artikel*. Diterbitkan dalam Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia "Widya Wretta". Denpasar.
- Supranto, Johannes. 1997. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sura, I Gede. 1985. *Pengendalian Diri dan Etika Dalam Ajaran Agama Hindu*. Jakarta: Hanuman Sakti.
- Sura, I Gde, dkk. 2002. *Kamus Istilah Agama Hindu*. Denpasar: Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
- Sutopo dan Adi Suryanto. 2006. *Pelayanan Prima*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.





- Thoha, Miftah, 1995. *Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Thomson, Neil (2005), *Understanding Social Work: Preparing for Practice*, New York: Palgrave.
- Suharto, Edi, 2005a. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Tjiptono, Fandy B. 1996. *Total Quality Service*. Jogjakarta: Andi Offset.
- Triguno. 1997. *Budaya Kerja*, Jakarta: PT. Golden Terayon Press.
- \_\_\_\_\_ 1999. *Budaya Kerja - Menciptakan Lingkungan Yang Kondusifive Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta : PT. Golden Terayon Press.
- Varma, S.P. 2001. *Teori Politik Modern*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Winardi, 1992. *Perilaku Organisasi*. Bandung. Tarsito.
- Yasa, I Wayan Suka. 2003. "Brahma Widya dalam Teks Tattwa-Jnana". *Tesis*. Denpasar: Program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
- Yasa, I Wayan Suka, dkk., 2006. *Yoga Marga Rahayu*. Denpasar: Fakultas Ilmu Agama Universitas Hindu Indonesia bekerjasama dengan Penerbit Widya Dharma.



Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Periode 2010 s/d 2015 membangun kota Denpasar dengan :

#### VISI

#### DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN

#### MISI

- Penguatan Jati Diri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali
  - Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal melalui Budaya Kreatif
- Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean goverment and good governance) melalui Penegakan Supremasi Hukum (law enforcement)
- Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat (welfare society)
- Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat melalui sistem Ekonomi Kerakyatan



# Sewaka Dharma

*Melayani adalah Kewajiban*

Sewaka Dharma,  
bila ditelisik sesungguhnya  
adalah lanjutan pengertian  
prinsip dasar pertama catur Asrama

Taki takining sewaka guna widya,  
bahwa apa yang bisa kita  
persembahkan sebagai dharma  
hanyalah sesuatu yang pernah  
dipersiapkan atau 'dipertajam'  
di masa muda bernama brahmacari.

Sewaka dharma sepertinya  
membuka kembali 'bekal' itu  
dalam menjalankan kewajiban  
dharma negara sebagai sebuah  
persembahan. Karena melayani  
hakekatnya merupakan bagian  
esensi manusia Hindu.



ISBN 978-602-9138-14-6



esbenasi@yahoo.com

PE  
Wa